

**SINERGITAS TIM TERPADU DAN KEPOLISIAN DALAM  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL DI  
MINIMARKET KOTA MALANG**

( Sinergitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2006 dan Peraturan  
Menteri Perdagangan Nomor 9 Tahun 2009 )

**JURNAL ILMIAH**

**Guna Memenuhi Syarat Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan  
Dalam Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**AYU BIMO SETYO PUTRI**

**105010100111071**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG**

**2014**

## HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Skripsi** : **SINERGITAS TIM TERPADU DAN KEPOLISIAN  
DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN  
MINUMAN BERALKOHOL DI MINIMARKET KOTA  
MALANG.**

**Identitas Penulis** :

**Nama** : **AYU BIMO SETYO PUTRI**

**NIM** : **105010100111071**

**Konsentrasi** : **Hukum Administrasi Negara**

**Jangka Waktu Penelitian** : **4 Bulan**

Disetujui pada tanggal: 23 Desember 2013.

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Dr. Moh. Fadli, S.H.,M.Hum.  
NIP. 196504011990021001

Dr. Shinta Hadiyantina, S.H.,M.H.  
NIP. 197703052009122001

Mengetahui,

Ketua Bagian  
Hukum Administrasi Negara

Lutfi Effendi, S.H.,M.Hum.  
NIP. 106008101986011002

# **SINERGITAS TIM TERPADU DAN KEPOLISIAN DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL DI MINIMARKET KOTA MALANG**

( Sinergitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2006 dan Peraturan  
Menteri Perdagangan Nomor 9 Tahun 2009 )

Ayu Bimo Setyo Putri, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: [ayuputri029@gmail.com](mailto:ayuputri029@gmail.com)

## **ABSTRAKSI**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana sinergi, bentuk tindakan, serta kendala yang dihadapi oleh tim terpadu dan aparat kepolisian untuk memaksimalkan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di minimarket Kota Malang. Penelitian dilakukan dengan metode pendekatan yuridis sosiologis dan yuridis komparatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dan Polresta Malang. Pada hasil penelitian telah dapat diketahui bahwa pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol telah dilakukan dengan menggunakan sistem sidak. Namun hal tersebut mengalami hambatan, antara lain karena para penjual minuman beralkohol telah mempunyai izin resmi dari pemerintah daerah kota Malang. Walaupun masih cukup banyak para penjual minuman beralkohol di kota Malang yang belum memiliki izin secara lengkap, namun minimarket minimarket yang berada di kota Malang telah memenuhi semua persyaratan yang dibuat oleh Pemda Malang yaitu SIUP untuk minuman beralkohol golongan A dan SIUP MB untuk minuman beralkohol golongan B dan C. Seharusnya Pemda Kota Malang menggganti Perda Kota Malang yang sudah ada seperti yang dilakukan oleh Pemda Kota Cirebon yang menerbitkan Perda Kota Cirebon No. No. 4 Tahun 2013 Tentang Pelarangan Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kota Cirebon. Dalam Perda ini melarang penjualan dan peredaran minuman beralkohol sampai kadar 0%.

Kata Kunci : Sinergi, Tim Terpadu dan Kepolisian, Pengawasan, Pengendalian,  
Minuman Beralkohol, Minimarket Kota Malang.

# **SYNERGY INTEGRATED TEAMS AND POLICE IN MONITORING AND CONTROL OF ALCOHOLIC BEVERAGES AT THE MINIMARKET IN MALANG**

( Synergy Region Regulation of Malang City Number 5 Year 2006 and  
Regulation of Ministry Trade Number 9 Year 2009 )

Ayu Bimo Setyo Putri, Law Faculty of Brawijaya University

Email: [ayuputri029@gmail.com](mailto:ayuputri029@gmail.com)

## **SUMARRY**

This research aims to find out and analyze how synergy, a form of action, as well as obstacles faced by integrated teams and police for maximal monitoring and control of alcoholic beverages at the minimarket of Malang. Research conducted with the juridical sociological approach method and comparative juridical. The data used are the primary data and secondary data obtained from the Department of industry and trade and Police of Polresta Malang. On the results of the research have been able to note that the monitoring and control of alcoholic beverages has been carried out by using a system of inspection. But it had some obstacles, among other is dealers alcoholic beverages have had a formal permission from local government city unfortunate. Although there are still many marketers alcoholic drinks at Malang city who do not have permission fully but minimarkets in Malang city has fulfilled all requirements made by regional government it's SIUP for alcoholic beverages golongan A and SIUP MB for alcoholic beverages golongan b and c. Governments of Malang city should be replace perda Malang city existing as practiced by governments Cirebon city that publishes perda oftown Cirebon number 4 in 2013 about distribution and sale of alcoholic beverages in town Cirebon. In this regulation trafficking and forbidding the sale of alcoholic beverages to 0 %.

Keywords: Synergy, an integrated team and police, supervision, control, alcoholic beverages, Minimarket Malang.

## I. PENDAHULUAN

Adanya tuntutan dunia global saat ini membuat masyarakat semakin mudah menemukan minimarket. Minimarket telah menjamur di masyarakat, baik itu di kota besar maupun jalan-jalan besar di pedesaan. Selain faktor kenyamanan, pelayanan yang baik, keanekaragaman barang dan jam operasional minimarket yang melayani selama 24 jam non stop. Di minimarket konsumen dapat melihat, memilih dan menentukan sendiri barang yang akan dibeli berdasarkan harga yang tertera. Pada akhirnya konsumen tidak hanya membeli barang yang dibutuhkan tetapi juga yang diinginkan. Hal tersebut juga membuat semua kalangan dengan mudah dapat membeli dan menikmati minuman beralkohol.

Inilah yang membuat pelajar ataupun anak dibawah umur dapat dengan mudah membeli dan mengkonsumsinya sesuka mereka, karena tidak ada pengawasan batas usia dalam pembelian produk minuman beralkohol dari pihak minimarket. Minuman beralkohol sendiri memiliki banyak efek negatif yang ditimbulkan bagi yang mengkonsumsinya yaitu terjadi pada gangguan fisik. Semakin banyaknya perilaku masyarakat yang suka minum-minuman beralkohol yang berlebihan, mengakibatkan semakin tingginya angka kriminalitas yang terjadi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Martabe Sitompul dan Basri, ditemukan dua bentuk kejahatan antara lain, tindak penganiayaan dan hubungan seks diluar nikah. Sebanyak 12 responden atau 75% pernah melakukan penganiayaan dan 4 responden atau 25% dalam penelitiannya melakukan hubungan seks diluar nikah. Tindak kejahatan yang dilakukan oleh mahasiswa pengkonsumsi minuman keras di karenakan hilangnya kontrol diri yang di pengaruhi oleh minuman keras yang di konsumsi, sehingga melupakan resiko-resiko yang akan terjadi akibat dari tindak kejahatan tersebut.<sup>1</sup>

Banyak sekali minimarket di Kota Malang yang menjual minuman beralkohol, tidak hanya minimarket tertentu yang menjual minuman beralkohol ini. Tak ayal menimbulkan kegeraman bagi beberapa kalangan organisasi masyarakat yang sering mengawasi perkembangan masyarakat.

---

<sup>1</sup> Jurnal Martabe Sitompul dan Basri tentang “**Profil Mahasiswa Pengkonsumsi Minuman Keras**”. Universitas Negeri Riau, Riau. hlm.12

Persoalan maraknya penjualan minuman beralkohol di minimarket sebenarnya adalah wewenang Dinas perindustrian dan perdagangan. Indonesia sebagai negara hukum memiliki undang-undang yang mengatur tentang pengadaan, pengedaran, penjualan, pengawasan, dan pengendalian minuman beralkohol yang berlaku secara nasional pada Peraturan Menteri Perdagangan No. 9 Tahun 2009, namun hal tersebut sudah ditambahkan dan dilengkapi dengan PERMEN Perdagangan No. 12 Tahun 2010.

Menurut Pasal 35 ayat (2) PERMEN Perdagangan No. 9 Tahun 2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol pada menyebutkan:

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilaksanakan oleh Dirjen Daglu, Dirjen PDN, dan Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen sesuai tugas pokok dan fungsinya dan mengoordinasikan pelaksanaannya dengan Pemerintah Daerah.

Pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kota Malang ini telah mempunyai Peraturan Daerah yang mengatur minuman beralkohol yaitu Peraturan Daerah ( yang selanjutnya dalam skripsi ini disebut PERDA) Kota Malang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol. Tetapi Kota Malang belum memperbarui PERDA Tahun 2006 tersebut dengan PERDA baru, padahal PERMEN Perdagangan tentang pengawasan minuman beralkohol telah dirubah beberapa kali, sehingga tidak adanya pengaturan tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol yang tertuang dalam PERDA tersebut. Pada Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2006 telah mencantumkan:

Penjual langsung minuman beralkohol dan pengecer minuman beralkohol, dilarang menjual minuman beralkohol golongan A, B dan C kecuali kepada warga negara indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan warga negara asing yang telah dewasa.

Adanya pengawasan dan pengendalian penjualan minuman beralkohol diperlukan agar penjualan minuman beralkohol tidak dilakukan disembarang tempat tetapi hanya tempat-tempat tertentu saja serta harus dikendalikan melalui perizinan dan pengawasannya, karena minuman beralkohol yang diminum tanpa memperhatikan aturan yang ada dalam kemasan barang tersebut, dapat berdampak negatif terhadap kesehatan maupun dampak sosial.

Dalam pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol ini dilakukan oleh Walikota/Bupati yang diberi amanat untuk membentuk tim terpadu yang dibantu oleh aparat kepolisian sebagai unsur pendukung yang menjadi lembaga yang menerima pelimpahan wewenang dari pemerintah untuk mengawasinya seperti yang tertuang dalam Pasal 34 PERMEN Perdagangan RI Nomor 9 Tahun 2009.

Di dalam Pasal 21 PERDA Kota Malang No.5 Tahun 2006 juga menyebutkan “Penertiban peredaran minuman beralkohol selain dapat dilakukan oleh Tim juga dapat dilakukan oleh instansi yang mempunyai fungsi atau kewenangan untuk penegakan Peraturan Daerah.” Seharusnya jika ditemukan Minuman Beralkohol di luar tempat yang diijinkan atau ditentukan, maka minuman beralkohol tersebut disita untuk dimusnahkan, seperti pada Pasal 20 ayat (3) PERDA Kota Malang No. 5 Tahun 2006. Tetapi menurut hasil survey yang telah dilakukan penulis, masih sangat kurang adanya sinergi antara tim terpadu dari dinas perdagangan dan perindustrian serta aparat kepolisian sebagai pendukung dalam pengawasan dan pengendalian penjualan minuman beralkohol seperti dalam Pasal 35 ayat (5) PERMEN Perdagangan Tahun 2010.

Menurut berita di media elektronik Arrahmah.com “Maraknya peredaran minuman keras di minimarket Kota Malang, menimbulkan keresahan seluruh masyarakat. Pasalnya Kota Malang dikenal sebagai ‘Kota Pendidikan’ tak ayal menimbulkan kemarahan warga Malang.”<sup>2</sup> Hal ini membuktikan bahwa, Disperindag dan Kepolisian Kota Malang kurang bersinergi dalam melakukan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol, sehingga sampai sekarang minuman beralkohol mudah didapat di minimarket yang menjamur di Kota Malang.

## II. PERMASALAHAN

Dari latar belakang tersebut permasalahan dalam artikel ini adalah:

1. Bagaimanakah bentuk sinergi yang dilakukan oleh tim terpadu dan kepolisian dalam pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di minimarket Kota Malang?

---

<sup>2</sup> Dikutip dari [www.arahmah.com](http://www.arahmah.com) **Miras di Minimarket meresahkan, Malang upayakan bentuk Tim Hisbah** yang diakses pada 25 Agustus 2013.

2. Apa tindakan yang seharusnya dilakukan tim terpadu dan kepolisian untuk memaksimalkan sinergi dalam rangka mengontrol peredaran minuman beralkohol di minimarket Kota Malang?
3. Mengapa terjadi penyimpangan pada Pasal 15 PERDA Kota Malang Nomor 5 Tahun 2006, dan apa kendala yang dihadapi oleh Tim Terpadu serta Kepolisian dalam pengawasannya di minimarket Kota Malang?

### III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan terhadap pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di minimarket kota Malang ini merupakan penelitian yuridis empiris. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yang bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang berusaha untuk mengidentifikasi hukum dan mengkaji peraturan hukum yang terdapat di masyarakat.<sup>3</sup> Pendekatan ini berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan nonhukum bagi keperluan penelitian.<sup>4</sup> serta yuridis komparatif, yaitu studi perbandingan bahan hukum dengan tujuan mendapatkan informasi dan perbandingan hukum terapan yang mempunyai sasaran tertentu. Pendekatan ini berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan hukum maupun nonhukum bagi keperluan peneliti.<sup>5</sup>

Berdasarkan ruang lingkup permasalahan yang telah diuraikan, maka lokasi penelitian yang dipilih di Kota Malang. Penelitian dilakukan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Kantor Polresta Malang, karena kedua lembaga itulah yang menurut survey yang dilakukan oleh penulis yang mempunyai tugas mengawasi dan mengendalikan peredaran minuman beralkohol sesuai dengan peraturan perundang undangan yang ada.

---

<sup>3</sup> Amirudin, dkk. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, hlm 135

<sup>4</sup> Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 175

<sup>5</sup> Zainuddin Ali, **Metode Penelitian Hukum, Jakarta**, Sinar Grafika, 2009. hlm. 175.



Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah penjelasan dan pengalaman dari pegawai DISPERINDAG sebagai salah satu dari anggota tim terpadu (satu orang), penjelasan dan pengalaman dari pihak Sabhara Polresta Malang serta humas Polresta Malang ( 2orang). Sedangkan data sekundernya adalah peraturan perundang undangan yang terkait dengan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol. Untuk mendapatkan data primer, wawancara bebas dengan menggunakan pedoman wawancara dan data sekunder diperoleh dari narasumber tersebut.

Hasil wawancara dan studi dokumen diuraikan dan dihubungkan secara sistematis sehingga dapat dikaji dalam menjawab permasalahan dalam artikel ini tentang sinergitas tim terpadu dan aparat kepolisian dalam pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di minimarket kota Malang. Deskriptif kualitatif digunakan untuk mengkaji data primer hasil wawancara bebas. Kata-kata kunci penting dari hasil wawancara tersebut antara lain: pengawasan dan pengendalian, minuman beralkohol, minimarket, digunakan untuk mendeskripsikan dan mengkaji sinergitas tim terpadu dan kepolisian dalam pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di minimarket kota Malang. Sedangkan studi dokumen terhadap data sekunder digunakan untuk memastikan data primernya.

#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### 1. Peredaran Minuman Beralkohol Di Minimarket

Dalam Permen Perdagangan Pasal 19 ayat (1) Nomor 9 Tahun 2009 menjelaskan bahwa “Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha pengedaran dan atau penjualan minuman beralkohol golongan B dan/ atau golongan C wajib memiliki SIUP-MB.” Kemudian dalam pasal yang sama ayat (2) menegaskan bahwa “Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha pengedaran dan atau penjualan minuman beralkohol golongan A wajib memiliki SIUP.”

Ketentuan perizinan penjualan minuman beralkohol yang ada dalam Pasal 8 ayat (1) Perda Kota Malang lebih menegaskan lagi bahwa “Setiap orang atau perusahaan yang menjual minuman beralkohol golongan A harus memiliki SIUP yang mencantumkan minuman beralkohol golongan A yang boleh dijual.” Kemudian selanjutnya ditegaskan lagi dalam pasal yang sama ayat (2) bahwa “Setiap orang atau perusahaan yang menjual minuman beralkohol golongan B dan C untuk diminum ditempat wajib memiliki SIUP dan SIUP-MB yang diterbitkan oleh Walikota.”

Kedua dasar hukum itulah yang menyebabkan Disperindag Kota Malang memperbolehkan minimarket di Kota Malang menjual minuman beralkohol golongan A, karena minimarket di Kota Malang telah mempunyai izin resmi untuk penjualan minuman beralkohol golongan A yaitu SIUP yang diterbitkan oleh Dinas Perizinan Kota Malang. Selain SIUP ada lagi IUTM (Izin Usaha Toko Modern) yang harus dimiliki minimarket ini, hal ini sesuai dengan Permen Perdagangan Nomor 46 Tahun 2009.

Menurut bapak Untung<sup>6</sup>, pihak Sabhara Kepolisian yang telah beberapa kali melakukan operasi mendadak di beberapa tempat tertentu menjelaskan

Di Kota Malang minimarket telah mempunyai SIUP, jadi kita tidak bisa menyita produk minuman beralkohol yang dijual di minimarket tersebut. Kecuali minimarket tersebut menjual minuman beralkohol golongan B dan C padahal tidak mempunyai SIUP-MB, kami jelas akan menindak penjual tersebut. Tetapi dalam bulan ramadhan kemarin Walikota mengeluarkan perwal Nomor 1 Tahun 2013 tentang

---

<sup>6</sup> Hasil Wawancara dengan Untung, anggota Sabhara Kepolisian Polresta Malang, tanggal 17 Oktober 2013

penertiban tempat hiburan selama ramadan. Jadi untuk menjaga kondisi dibulan ramadhan tetap kondusif kami melakukan operasi yang dilakukan secara mendadak. Minimarket yang menjual minuman beralkohol kami minta untuk disimpan dalam gudang terlebih dahulu. Kami tidak menyita karena mereka punya izin, tetapi selama bulan ramadan, tetap diharapkan untuk tidak dijual dulu.

## **2. Bentuk Sinergi Antar Tim Terpadu Dan Aparat Kepolisian**

Menurut teori Iversen suatu sinergi dapat dikatakan maksimal apabila sinergi tersebut sudah dilakukan secara terpusat, terpadu, berkesinambungan, dan menggunakan pendekatan multiinstansional. Dengan dilakukan seperti itu maka sistem sinergi akan menjadi suatu kerja sama yang maksimal dalam mencapai tujuannya.

Pada pelaksanaan teknisnya pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kota Malang menurut Jevry selaku pegawai Disperindag Kota Malang mengatakan:

Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol, tim terpadu yang terdiri dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang, Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah Sekretariat Daerah Kota Malang mempunyai kegiatan rutin tahunan yaitu operasi mendadak atau yang lebih sering disebut sidak yang dilakukan setahun dua kali. Yaitu pada triwulan ke dua pada bulan april dan saat menjelang bulan puasa.<sup>7</sup>

Di dalam pelaksanaan operasi mendadak tersebut, tim terpadu terkadang meminta bantuan pada aparat kepolisian. Setelah melakukan koordinasi dan pembagian tim, tim terpadu dibantu oleh polisi langsung menuju lokasi penjualan minuman beralkohol yang diambil sampelnya secara acak, jadi tidak semua tempat yang berjualan minuman beralkohol didatangi oleh tim terpadu dan kepolisian untuk operasi mendadak.

Operasi mendadak yang dilakukan oleh tim terpadu dan kepolisian ini bertujuan untuk mengontrol persyaratan perizinan yang harus di penuhi oleh penjual minuman beralkohol seperti kepemilikan SIUP untuk penjual minuman beralkohol golongan A dan SIUP MB untuk penjual minuman beralkohol dengan golongan B dan C.

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Jevry, anggota DISPERINDAG tanggal 4 Oktober 2013.

Jika penjual minuman beralkohol tersebut telah memenuhi semua persyaratan dan perizinannya sesuai yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangannya, maka penjual tersebut lolos dalam sidak. Tetapi jika ditemukan penjual tersebut tidak memiliki SIUP maupun SIUP-MB maka tim terpadu dan kepolisian akan mengambil minuman beralkohol minuman beralkohol tersebut untuk disita. Dan memanggil pemiliknya dan kemudian dikenakan sebagai pelaku tindak pidana ringan atau tipiring.

Menurut *Iversen* sinergi antara tim terpadu dan kepolisian belum bisa dikatakan efektif karena belum memaksimalkan prinsip prinsip sebagai berikut:

a. Koordinasi

Koordinasi memang dibutuhkan antara tim terpadu dan kepolisian dalam pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol, karena memang tujuan dari kedua lembaga ini sama, dilain sisi untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif minuman beralkohol, disisi lain juga dalam rangka penegakkan hukum positif yang ada. Koordinasi yang telah dilakukan oleh tim terpadu dan kepolisian ini dirasa sangat kurang.

b. Integrasi

Integrasi / penyatuan adalah sebuah pembawaan hingga menjadi suatu kesatuan yang utuh atau bulat antara komponen komponen yang ada.

c. Sinkronisasi

Dalam proses sinergi antara tim terpadu dan kepolisian seharusnya dapat menyamakan visi dan misinya dalam hal pengawasan dan pengendalian minuman bealkohol ini. Prinsip prinsip sinkronisasi diartikan sebagai sebuah arahan untuk menyamakan pendapat, kerja, komunikasi, dll sehingga terhindar dari *unsynchronization*.

Pada bulan Agustus tim terpadu dan kepolisian telah melakukan sidak khusus di minimarket, namun hasilnya nihil. Semua minimarket yang di sidak telah mempunyai SIUP, bahkan SIUP-MB, jadi tim terpadu dan kepolisian tidak bisa menindaknya.

### **3. Upaya Dalam Memaksimalkan Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Berakohol Di Minimarket**

Menurut hasil penelitian penulis, berkaitan dengan perizinannya sudah semua minimarket yang ada di Kota Malang mempunyai SIUP. Tetapi tidak

semua dari minimarket tersebut mempunyai SIUP-MB, karena dalam Pasal 8 ayat (1) Perda Kota Malang No. 5 Tahun 2006 maupun Pasal 19 ayat (2) Permen Perdagangan No.9 Tahun 2009 memperbolehkan orang atau perusahaan menjual minuman beralkohol Gol.A dengan kepemilikan SIUP yang mencantumkan minuman beralkohol yang boleh dijual.

Menurut Jevry, selaku pegawai Disperindag Kota Malang mengatakan:

“Selama ini kami juga telah melakukan upaya upaya dalam rangka mengawal pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol, salah satunya dengan pemberlakuan yang relatif mahal untuk pengurusan SIUP-MB. Untuk biaya pembuatan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol yang harus dimiliki untuk persyaratan penjualan minuman beralkohol golongan B dan golongan C ini sekitar Rp.50.000.000.00 – Rp.75.000.000.00 ( lima puluh juta rupiah sampai dengan tujuh puluh lima juta rupiah). Hal ini dirasa cukup untuk membebani para penjual minuman beralkohol golongan B dan C. Untuk penerbitan SIUP-MB ini, para penjual minuman beralkohol juga dikenakan retrebusi secara rutin yaitu 5 tahun sekali. Selain dari upaya penerbitan izinnya yang mahal kami juga melakukan pengawasan rutin tahunan yang dilakukan 2 kali setiap tahun, untuk pengawasan peredaran minuman beralkohol ini untuk semua golongan, baik golongan A, golongan B dan golongan C.”

Biaya yang relatif mahal untuk penerbitan SIUP-MB, pemberlakuan retrebusi minuman beralkohol setiap 5 tahun sekali, dan pengawasan rutin setahun 2 kali adalah beberapa upaya yang telah dilakukan dari Disperindag yang kepala dinasnya merupakan kepala dari tim terpadu dalam pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kota Malang.

Peredaran minuman beralkohol yang sangat meresahkan masyarakat tersebut sebenarnya tidak perlu terjadi upaya upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini seharusnya sebagai pihak yang memegang kendali penuh untuk mengatur masyarakat agar tetap tercipta suasana yang kondusif. Beberapa upaya yang seharusnya dilakukan untuk mengawasi dan mengendalikan minuman beralkohol:

1. Melakukan operasi mendadak dengan kurun waktu yang lebih insentif, tidak hanya pada waktu bulan ramadhan saja. Kegiatan rutin tahunan untuk melaksanakan sidak 2 kali setiap tahun dirasa sangat kurang efektif untuk mengawasi dan mengendalikan peredaran minuman beralkohol ini. Jika sidak dilakukan lebih sering maka para penjual minuman beralkohol yang tidak

sesuai izin tentu akan lebih berpikir berkali kali untuk melakukan usaha penjualan minuman beralkohol secara ilegal.

2. Peran serta masyarakat dalam pelaporan penjualan minuman beralkohol sangat diperlukan bagi kepolisian dalam proses penyidikan tindak pidana ringan ini. Dengan adanya pelaporan dari masyarakat, Sabhara bisa langsung terjun ke tempat kejadian perkara, untuk selanjutnya memanggil pemilik tempat tersebut, mengambil barang bukti sebagai proses penyidikan yang kemudian akan diteruskan dan di limpahkan pada pengadilan negeri yang berhak mengadilinya dan memutuskan hukumannya.
3. Perlunya menunjukkan KTP pada saat pembelian minuman beralkohol. Hal ini dirasa sangat penting untuk mengawasi dan mengendalikan peredaran minuman beralkohol. Karena dengan menunjukkan KTP ini penjual dapat mengetahui apakah pembelinya sudah berusia masih dibawah 21 tahun atau sudah diatas 21 tahun sehingga dirasa lebih layak untuk mengkonsumsi minuman beralkohol karena telah dewasa, bukan masuk dalam katagori anak anak lagi.
4. Upaya upaya penegakan hukum benar-benar diterapkan. Upaya penegakan hukum yang diterapkan dibedakan menjadi 3, yaitu:
  - a. Sarana Hukum Administrasi
    - 1) Pengawasan dan Pengendalian
    - 2) Penertiban
    - 3) Sanksi Administrasi
  - a) Sarana Hukum Pidana
    - a. Penyidikan
    - b. Sanksi pidana

Tim terpadu dan kepolisian Kota Malang seharusnya lebih serius dalam mengawasi peredaran dan penjualan minuman beralkohol, karena minuman beralkohol dapat merusak ketertiban dan ketentraman kehidupan masyarakat, serta berdampak pada kesehatan dan dampak sosial lainnya. Maka dari itu sudah seharusnya payung hukum yang ada diperbarui sehingga sesuai dengan perkembangan zaman. Seperti pada perda Kota Cirebon yang membuat Perda Pelarangan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Cirebon.

Perda Kota Cirebon No.4 Tahun 2013 ini tentu saja memberikan payung hukum yang sangat kuat untuk pemberantasan minuman beralkohol di Kota

Cirebon, jadi minimarket minimarket tidak bisa mengedarkan minuman beralkohol secara bebas seperti di Kota Malang. Bahkan tidak hanya minimarket yang dilarang untuk berjualan minuman beralkohol, tetapi semua orang tau badan hukum yang telah memiliki izin berupa SIUP ataupun SIUP-MB dalam waktu tiga bulan sejak pengundangan perda ini akan dicabut secara resmi. Jadi jika setelah tiga bulan pengundangan perda Kota Cirebon ini masih ditemukan orang atau badan hukum yang menjual dan mengedarkan minuman beralkohol, yang tidak mempunyai izin ataupun yang mempunyai izin resmi, minuman beralkohol tersebut akan disita oleh pihak berwajib yang akan melakukan penertiban dan pengawasan perda tersebut.

#### **4. Kendala yang Dihadapi dan Penyebab Terjadinya Penyimpangan Norma**

Dalam melaksanakan sinergi pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol tim terpadu dan kepolisian Kota Malang sebenarnya telah melakukan kerjasama pada beberapa operasi mendadak yang setiap tahunnya dilakukan. Tetapi ada beberapa faktor yang menghambat sinergi tim terpadu dan kepolisian sehingga belum memenuhi hasil maksimal yang diharapkan. Faktor faktor tersebut diantaranya:

- a) Faktor permintaan
- b) Faktor Pemasok
- c) Faktor Penunjang

*Lawrance M Friedman* mengatakan bahwa yang sangat mempengaruhi efektifnya hukum adalah bagaimana keadaan kultur, struktur dan substansi. Hal ini memang dapat dilihat secara jelas dalam pelaksanaan Perda Kota Malang yaitu:

##### **a. Kultur**

Budaya hukum masyarakat yang ada di Kota Malang sangatlah berpengaruh terhadap efektifnya hukum yang berlaku saat ini. Kesadaran hukum dalam masyarakat bukanlah satu prosesnya mudah jalankan.

##### **b. Struktur**

Struktur disini dimaksudkan adalah aparat penegak hukumnya. Penegak hukum sangatlah berpengaruh terhadap efektifnya hukum yang ada. Jika penegakan hukum dirasa oleh masyarakat kurang, maka hal tersebut membuat masyarakat cenderung untuk bergerak berlawanan dengan hukum yang ada.

### c. Substansi

Yang dimaksudkan substansi disini adalah hukum yang berlaku pada masyarakat tersebut.

Itulah ketiga unsur yang harus dipenuhi dalam substansi peraturan perundang undangan agar memenuhi syarat bahwa peraturan tersebut bisa berlaku lebih efektif. Tetapi sesuai perkembangan yang terjadi saat ini, masyarakat berubah menjadi kurang percaya terhadap hukum yang ada, akibat faktor faktor tertentu. Salah satunya dikarenakan faktor penegak hukum yang menjadikan hukum sebagai suatu alasan untuk melakukan tindakan tindakan yang kadang kadang merugikan masyarakat. Apalagi orang yang masih awan tentang hukum, sehingga mudah di manfaatkan sebagai obat penderitanya.

Hukum diperlukan dalam suatu masyarakat karena sifatnya yang mengatur hak dan kewajiban masyarakat, sehingga tidak merugikan satu dan lainnya. Akibat perkembangan zaman yang ada, hukum harus dapat mengikuti irama perkembangan masyarakat, bahkan hukum harus dapat mengarahkan dan mendorong berkembangnya masyarakat secara lebih tepat dan terkendali.

Namun tidak dapat diabaikan bahwa alah satu faktor keefektifan hukum adalah kesadaran masyarakat sendiri. Kesadaran masyarakat merupakan faktor yang penting dalam hukum. Semakin lemah kesadaran hukum masyarakat, semakin lemah pula ketaatan hukum masyarakat. Dan sebaliknya semakin kuat kesadaran hukum masyarakat maka semakin kuat ketaatan hukum masyarakat tersebut. Sehingga proses perkembangan dan efektifitas hukum dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di minimarket Kota Malang memang sudah sangat mengkhawatirkan, karena di minimarket yang dapat ditemui dengan mudah minuman beralkohol juga dapat ditemukan. Walaupun minuman beralkohol ini telah dinyatakan barang yang dalam pengawasan dan pemerintah Kota Malang telah mengesahkan Perda Kota Malang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengawasan, Pengendalian Dan Pelarangan Penjualan Minuman beralkohol, namun Perda tersebut di rasa sangat kurang efektif, mengingat di minimarket sangat mudah ditemukan minuman beralkohol. Di lain sisi tim terpadu dan kepolisian sebagai penegak hukum kurang berkoordinasi dalam pengawasan dan peredaran minuman beralkohol.



Dampak dari kurang efektifnya peraturan perundang undangan tersebut, minimarket sebagai salah satu pihak penjual dapat menjual secara bebas minuman beralkohol tanpa mengharuskan pembelinya menunjukkan KTP saat pembeli membeli berbagai merek minuman beralkohol yang dijualnya. Hanya ada sebagian kecil minimarket yang menempelkan pemberitahuan bahwa minuman beralkohol tersebut tidak dijual untuk usia dibawah 21 tahun.

Namun dengan adanya pemberitahuan tersebut juga tidak berdampak besar bagi pengendalian minuman beralkohol, seperti yang diharapkan agar usia 21 tahun kebawah tidak mengkonsumsi minuman beralkohol. Karena hal tersebut hanya bersifat pemberitahuan, tidak ada kewajiban menunjukkan KTP maka mahasiswa yang berada dibawah umur 21 tahun maupun pelajar SMA pun bisa membelinya di minimarket.

## **V. PENUTUP**

### **VI. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian pembahasan di atas mengenai sinergi pengawasan antara tim terpadu dan aparat kepolisian terhadap pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di minimarket Kota Malang, maka penulis dapat memaparkan beberapa fakta sebagai berikut :

1. Sinergitas tim terpadu dan kepolisian dalam pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol telah ada, mereka mempunyai kegiatan rutin tahunan yaitu operasi mendadak yang dilakukan secara rutin 2 kali dalam satu tahun. Namun karena minimarket di kota Malang telah mempunyai SIUP, maka tim terpadu dan aparat kepolisian hanya dapat menindak pengedaran minuman beralkohol pada minimarket Kota Malang diatas golongan A.
2. Untuk memaksimalkan sinergitas tim terpadu dan kepolisian seharusnya melakukan sidak lebih insentif, memaksimalkan peran serta masyarakat dalam pelaporan penjualan minuman beralkohol, memaksimalkan usaha peraturan perundang undangan yang telah ada (seperti menunjukkan KTP pada saat

pembelian minuman beralkohol), dan benar benar menerapkan upaya penegakan hukum yang telah ada.

3. Pasal 15 PERDA Kota Malang Nomor 5 Tahun 2006 sangat tidak efektif karena tidak adanya upaya dari pihak pihak yang terkait untuk mengefektifkan pasal tersebut. Kendala pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di minimarket Kota Malang salah satunya adalah pengaturan penjualan minuman beralkohol di minimarket memang telah di legalkan dalam peraturan perundang undangannya. Minuman beralkohol yang di jual di minimarket sebagian besar adalah golongan A yang diperbolehkan dijual oleh perusahaan atau perseorangan dengan kepemilikan SIUP penjualnya. Sedangkan golongan B dan C hanya diperbolehkan dijual dengan kepemilikan SIUP-MB oleh penjualnya.

## **VII. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas yang ditarik dari pembahasan yang ada, penulis memberikan saran

1. Bagi tim terpadu dan kepolisian seharusnya lebih sering terjun ke lapangan melakukan operasi mendadak atau pengawasan minuman beralkohol di minimarket minimarket yang rawan melakukan pelanggaran terhadap hukum yang telah diatur. Jadi, pengawasan atau penegakan hukum terkait pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di minimarket Kota Malang, tidak hanya terlaksana pada saat kegiatan sidak rutin tahunan dua kali setahun dan karena laporan oleh masyarakat saja.
2. Bagi Pembentuk Undang undang harusnya mampu membuat Perda Kota Malang bebas Alkohol 0% untuk lebih melindungi masyarakat Kota Malang terhadap pengaruh bahaya minuman beralkohol seperti perda Kota Cirebon.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**,. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta. 2004.
- Bambang Sunggono, **Metodologi Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.
- Lawrence M Friedman, *The Legal System in A Sosial Perspektif*, Russel Sage Foundation, New York, 1975.
- Margono Soekardjo, Metode Peneliatian Pendidikan, Rineka Cipta: Jakarta, 2008.
- Zainuddin Ali. **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

## JURNAL

- Martabe Sitompul dan Basri, **Profil Mahasiswa Pengkonsumsi Minuman Keras**, Universitas Negeri Riau, Riau, 2012.

## PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

- Peraturan Daerah Kota Malang No. 5 Tahun 2006 Tentang *Pengawasan, Pengendalian Dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol*.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 53/M-Dag/Per/12/2010 Tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, Dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

## INTERNET

- Dikutip dari [www.arringmah.com](http://www.arringmah.com) **Miras di Minimarket meresahkan, Malang upayakan bentuk Tim Hisbah** (25 agustus 2013).